

**STUDI KONVERSI HUTAN KEMIRI RAKYAT
DI KELURAHAN MARIO PULANA
KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

Oleh :

**REFKY ABDILLAH
M 111 02 039**



	27-2-08
	Feb. Kehutanan
	1 es
	Wahid
No. Jns	15
No. Krs	SICR - 1408

ABD
S.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Studi Konversi Hutan Kemiri Rakyat di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan

Nama : Refky Abdillah

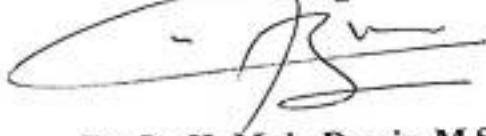
NIM : M 111 02 039

Program Studi : Manajemen Hutan

Skripsi ini Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan
Pada
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

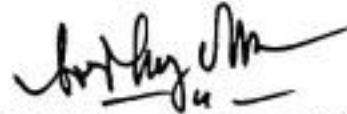
**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si

Pembimbing II



Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MS

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin**



Ir. Budiriman Baentiar, MS
Nip. 131 570 887

Tanggal Lulus : 21 Februari 2008

ABSTRAK

Refky Abdillah (M 111 02 039). Studi Konversi Hutan Kemiri Rakyat di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan, di bawah bimbingan H. Muhammad Dassir dan H. Syamsu Alam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola konversi hutan kemiri rakyat (HKR) dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konversi hutan kemiri rakyat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2007 di Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua masyarakat (petani) yang terdapat di Kelurahan Mario Pulana yang memiliki hutan kemiri rakyat. Metode pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan tehnik *purposive sampling* (uji petik secara pilih kasih) dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara terstruktur menggunakan kuisisioner dan wawancara tidak terstruktur serta observasi lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptif dan Regresi Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola konversi yang terdapat di Kelurahan Mario Pulana ada tiga yaitu pola penggunaan dari Hutan Kemiri Rakyat (HKR) ke ladang, pola penggunaan dari HKR ke kebun, dan pola penggunaan dari HKR ke persawahan, dimana pola yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah pola penggunaan dari HKR ke persawahan. Besarnya jumlah persentase tingkat konversi di Kelurahan Mario Pulana selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata tingkat konversi HKR sebesar 45,53% tiap rumah tangga, dimana 43,33% merupakan tingkat konversi yang tergolong tinggi dan 56,67% merupakan tingkat konversi yang tergolong rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi konversi hutan kemiri rakyat di Kelurahan Mario Pulana ada tiga faktor, faktor yang pertama adalah jarak lahan, dimana semakin jauh jarak lahan HKR dari pemukiman penduduk akan semakin mnurunkan tingkat konversi HKR. Faktor yang kedua adalah pendapatan sawah, semakin tinggi pendapatan yang diterima dari pola penggunaan sawah maka akan semakin meningkatkan konversi HKR. Faktor yang ketiga adalah luas lahan kemiri, dimana semakin luas lahan kemiri maka konversi HKR akan semakin meningkat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang disusun dengan judul “Studi Konversi Hutan Kemiri Rakyat di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Ir. H. Muhammad Dassir, M.Si**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MS** selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
2. Bapak **Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP** selaku Dekan Fakultas Kehutanan.
3. Bapak **Ir. Budirman Bachtiar, MS** selaku Penasehat Akademik yang telah membantu selama Penulis menjalani masa studi pada Program Studi Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan.
4. **Dosen-dosen beserta seluruh staff dan karyawan** Fakultas Kehutanan.

5. Sahabat dan teman-teman saya, **Zulfikar, Muh. Imran, Dwi Hartati, Verdyantoro, A. Fitriani, Wiwien, Silva, Rika, Murdiawati, Leo, Taufik, Hendra, Sultan, Ika Nur Annisa, Ld. Swardianto, Ningsih, Tuti, Mimi, Muh. Danial, Mimi, Hera, Ani, Ocha, Arif Rahman** dan semua teman-teman Fakultas Kehutanan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Terkhusus penulis haturkan terima kasih dan bakti sedalam-dalamnya kepada orangtuaku tercinta Ayahanda **Agus Made Ali** dan Ibunda **Ida Afrida**, serta saudara-saudaraku tersayang, **Refka Afrizal, Resqy Amaliyah, Revica Adhani, Redita Chaeria Tappa, Renita Chaeria Tappa** beserta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan baik moril maupun materil, do'a serta kasih sayang yang tulus kepada Penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis, sehingga dengan segala kerendahan hati, saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahuwata'ala.

Makassar, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat.....	4
1. Pengertian Hutan Rakyat	4
2. Manfaat Hutan Rakyat	5
3. Kebijakan Pemerintah Tentang Hutan Rakyat	6
B. Hutan Kemiri Rakyat di Kabupaten Maros	8
1. Karakteristik Kemiri (<i>Aleurites mollucana</i>)	8
2. Potensi Hutan Kemiri Rakyat di Kabupaten Maros	9
C. Faktor yang Mempengaruhi Konversi Hutan Kemiri Rakyat ...	11
D. Pengaruh Sewa Lahan terhadap Konversi Hutan Rakyat	13
III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	14
B. Populasi dan Sampel	14
C. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data.....	14

1. Teknik Pengumpulan Data	14
a. Wawancara	14
b. Observasi Lapangan	15
2. Jenis Data	15
a. Data Primer	15
b. Data Sekunder	15
D. Analisis Data	16
1. Analisis Deskriptif	16
2. Analisis Pendapatan	16
3. Analisis Konversi	17
4. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Hutan Kemiri Rakyat	17
E. Konsep Operasional	18

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Wilayah	20
1. Letak dan Luas	20
2. Topografi	20
3. Iklim	20
B. Keadaan Sosial Ekonomi	24
1. Penduduk	24
2. Mata Pencaharian	25
3. Tingkat Pendidikan	25
4. Sarana dan Prasarana	26
5. Peruntukan Lahan	27

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat	28
B. Deskripsi Konversi Hutan Kemiri Rakyat	32
1. Pola Konversi Hutan Kemiri Rakyat	32
2. Tingkat Konversi Hutan Kemiri Rakyat	33
3. Jarak Lahan	34
4. Pendapatan Sawah	35
5. Luas Lahan Kemiri dan non Kemiri	36

C. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Hutan Kemiri Rakyat	37
1. Analisis Regresi Berganda (<i>Full Model Regresion</i>)	37
2. Hubungan Jarak Lahan dengan Konversi Hutan Kemiri Rakyat	38
3. Hubungan Pendapatan Sawah dengan Konversi Hutan Kemiri Rakyat	39
4. Hubungan Luas Lahan Kemiri dengan Konversi Hutan Kemiri Rakyat	40
5. Hubungan Luas Lahan non Kemiri dengan Konversi Hutan Kemiri Rakyat	41

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Pembagian Tipe Iklim Berdasarkan Q Ratio Menurut Schmidt dan Ferguson	21
2.	Data Curah Hujan selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros (1997 – 2006)	22
3.	Nilai Rata-rata Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros	23
4.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros	24
5.	Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros	25
6.	Klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros	26
7.	Sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros	26
8.	Peruntukan Lahan Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros	27
9.	Pola Konversi HKR di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros	33
10.	Tingkat Konversi HKR di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros	33
11.	Jarak Lahan HKR di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros	34
12.	Rata-rata Pendapatan Petani dari berbagai Pola Usaha Tani	35
13.	Pendapatan Sawah di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros	36
14.	Luas Lahan Kemiri dan non Kemiri di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros	37

15.	Hasil analisis regresi berganda (<i>full model regresion</i>) terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi konversi hutan kemiri rakyat	38
16.	Hubungan Jarak Lahan dengan Konversi HKR	39
17.	Hubungan Pendapatan Sawah dengan Konversi HKR	40
18.	Hubungan Luas Lahan Kemiri dengan Konversi HKR	41
19.	Hubungan Luas Lahan non Kemiri dengan Konversi HKR	41

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Kuisisioner Petani hutan Kemiri Rakyat.....	
2.	Identitas Responden	
3.	Hasil Analisis Tingkat Konversi Hutan Kemiri Rakyat	
4.	Jarak Lahan HKR	
5.	Pendapatan dari berbagai Pola Usaha Tani	
6.	Luas Lahan Kemiri	
7.	Luas Lahan non Kemiri	
8.	Data Regresi	
9.	Hasil Analisis Regresi Konversi HKR di Kelurahan Mario Pulana	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kehutanan dititikberatkan pada pemanfaatan sumberdaya hutan pada kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial secara seimbang. Pengelolaan hutan bukan hanya sekedar menetapkan hutan sebagai perlindungan tanah, iklim, sumber air dan pemenuhan kebutuhan akan kayu dan produk lainnya. Pengelolaan hutan harus ditujukan untuk mendayagunakan lahan demi kepentingan negara.

Upaya pemenuhan kebutuhan hasil hutan dan konservasi sumberdaya hutan dan lingkungan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan hal yang mutlak. Salah satu alternatif yang mempunyai prospek yang baik untuk memenuhi kebutuhan hasil hutan adalah pengembangan hutan rakyat. Pembangunan hutan rakyat akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, baik manfaat yang secara langsung maupun manfaat yang tidak secara langsung dapat dirasakan. Manfaat yang dapat langsung dirasakan antara lain pemenuhan kebutuhan kayu bakar, kayu pertukangan, bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja pedesaan dan lain-lain yang dapat meningkatkan pendapatan. Sedangkan manfaat yang tidak secara langsung dapat dirasakan (manfaat ekologis), antara lain berupa peningkatan kesuburan lahan dan penanggulangan erosi.

Pembangunan hutan rakyat yang bernilai ekonomi, memerlukan suatu usaha pembudidayaan dan pengembangan tanaman guna mendapatkan pertumbuhan dan produksi yang optimal. Salah satu jenis hutan rakyat adalah

hutan kemiri rakyat (HKR) yang cukup potensial untuk menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat maupun sebagai komoditi perdagangan. Luas hutan rakyat di Kabupaten Maros adalah 9.299 ha dengan rata-rata luas kepemilikan petani 1.87 ha (62.54 % dari total lahan yang dikuasai). Hutan rakyat tersebut tersebar di dalam kawasan hutan yaitu 7.001 ha dan di luar kawasan hutan yaitu seluas 2.298 ha (Dinas Kehutanan Kab Maros, 2002, Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan, 2005 dan Yusran, 2005).

Hutan rakyat di Kabupaten Maros saat ini banyak dikonversi untuk penggunaan lain, padahal hutan rakyat tersebut mempunyai fungsi perlindungan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena pola penggunaan lahan ditentukan oleh besarnya sewa lahan yang diterima dari suatu pola penggunaan lahan. Pola penggunaan lahan yang memberikan sewa lahan yang tinggi akan mengganti pola penggunaan lahan dengan sewa lahan yang rendah.

Kecenderungan para petani khususnya petani di Kelurahan Mario Pulana untuk mengkonversi areal hutan rakyat ke penggunaan non kehutanan, disebabkan oleh rendahnya nilai sewa lahan (pendapatan yang diterima dari lahan) dari hasil usaha hutan rakyat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Barlow (1978) yang menyatakan bahwa pola penggunaan lahan ditentukan oleh besarnya sewa lahan yang diterima dari suatu pola penggunaan lahan. Pola penggunaan lahan yang memberikan sewa lahan yang tinggi akan mengganti pola penggunaan lahan dengan sewa lahan yang rendah. Sewa lahan rendah yang diterima petani dari hutan rakyat terjadi karena sewa yang diterima petani selama ini hanyalah sewa

lahan yang berasal dari asset fisik berupa kesuburan tanah dan lokasi. Sedangkan sewa lahan non fisik berupa kenyamanan lingkungan tidak diterima oleh petani hutan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka studi tentang konversi hutan kemiri rakyat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat diperlukan dalam mewujudkan pengelolaan hutan rakyat. Selain itu sebagai upaya pemanfaatan dan penggalian sumberdaya potensial desa untuk meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi desa secara mandiri dan kokoh.

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pola konversi hutan kemiri rakyat.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konversi hutan kemiri rakyat.

Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat khususnya di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat

1. Pengertian Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0.25 ha dengan penutup tajuk tanaman kayu-kayuan atau jenis lainnya lebih 50%, atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar (SK Menteri Kehutanan No. 49/KPTS-II/1997 dalam Supriadi, 2002). Di dalam UU No. 41/1999 tentang kehutanan sebagai pengganti UU No. 5/1967, istilah hutan rakyat disebut hutan hak.

Menurut Suharjito (2000), keberadaan hutan rakyat tidaklah semata-mata akibat interaksi alami antara komponen botani, mikroorganisme, mineral tanah, air, udara, melainkan adanya peran manusia dan kebudayaannya. Kreasi budaya yang dikembangkan dalam interaksinya dengan hutan, berbeda-beda antar kelompok masyarakat. Hasil budaya ini terwujud dalam pola tanaman yang bervariasi dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, dari suatu kelompok ke kelompok masyarakat lainnya.

Hutan rakyat telah berkembang sejak lama di Indonesia, dan dilakukan secara tradisional oleh masyarakat di lahan miliknya/ dikuasainya. Hal ini terlihat adanya hutan yang diusahakan oleh masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Berdasarkan jenis tanaman dan pola penanamannya, maka hutan rakyat dibagi atas :

- a. Hutan rakyat murni, yaitu hutan rakyat yang terdiri dari suatu jenis tanaman pokok yang ditanamkan dan diusahakan secara homogen atau monokultur.
- b. Hutan rakyat campuran, yaitu hutan rakyat yang terdiri dari berbagai jenis pohon-pohon yang ditanam secara campuran.
- c. Hutan rakyat system Agroforestry Tumpang Sari, yaitu hutan rakyat yang mempunyai bentuk usaha tani lainnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain secara terpadu pada suatu lokasi.

2. Manfaat Hutan Rakyat

Djajapertjuanda (1995), menyatakan bahwa hutan rakyat berperan penting dan memiliki manfaat, diantaranya :

- a. Hutan rakyat merupakan sumber pendapatan masyarakat yang berkesinambungan dan berbentuk tabungan.
- b. Keberadaan hutan rakyat dapat memberikan lapangan kerja yang cukup berarti.
- c. Produksi hutan rakyat yang berupa kayu dan bukan kayu dapat mendorong dibangunnya industri rakyat yang akan mempunyai peranan penting dalam ekonomi nasional.
- d. Hutan rakyat dibangun lahan-lahan kritis dapat berperan dalam melindungi bahaya erosi, sedangkan hutan rakyat yang memiliki jenis-jenis tertentu dapat meningkatkan kesuburan tanah.

- e. Hutan rakyat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai pajak dan pungutan.
- f. Hutan rakyat dapat meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal, termasuk lahan-lahan marginal.

Simon (1995) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan hutan rakyat akan memberikan sumbangan positif untuk pembangunan nasional dalam bentuk :

- a. Meningkatkan produksi kayu dan hasil hutannya.
- b. Meningkatkan kerja dan aksesibilitas di pedesaan.
- c. Memperbaiki system tata air serta meningkatkan proteksi permukaan tanah dari gangguan erosi.
- d. Meningkatkan proses penguraian oksida Karbon (CO₂) dan polutan lain di udara karena intensitas fotosintesis di permukaan bumi bertambah.
- e. Dalam waktu yang sama, proses fotosintesis menjaga kadar oksigen dalam udara dapat dipertahankan pada tingkat yang baik untuk makhluk hidup anaerob.
- f. Tetap menyediakan habitat yang baik untuk satwa sehingga dapat menjaga keragaman hayati fauna.

3. Kebijakan Pemerintah tentang Hutan Rakyat

Dorongan perubahan strategi kebijakan pembangunan kehutanan dari yang semata-mata memperhatikan produk kayu (penambangan kayu dan perkebunan kayu) atau lebih dikenal dengan istilah timber extraction and timber management menuju pengelolaan hutan secara hati-hati dan berorientasi kepada kepentingan

masyarakat dan lingkungan (Forest resources management dan forest ecosystem management). Kondisi ini membuka peluang yang besar untuk membangun hutan rakyat yang lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan bahan baku kayu untuk berbagai keperluan, baik untuk kepentingan industri penggergajian maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kayu perkakas dan kayu bakar. Di lain pihak, pemasokan kayu dari hutan alam sebagai bahan baku industri maupun kebutuhan masyarakat dirasakan tidak mencukupi. Keadaan ini disebabkan system pengelolaan yang tidak memenuhi syarat terwujudnya asa kelestarian oleh BUMN maupun swasta, disamping karena gangguan dari masyarakat sekitar hutan yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku tersebut, sekaligus merehabilitasi lahan kritis, antara lain ditempuh dengan pengembangan hutan rakyat. Hutan rakyat menurut keputusan Menteri Kehutanan No. 101 tahun 1996 adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50% atau pada tanaman pertama sebanyak 500 tanaman (Simon, 1998). Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 1999 hutan rakyat disebut juga hutan hak. Hutan rakyat atau hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Salim, 2003).

Dalam bidang pendanaan hutan rakyat, berdasarkan SK Menti Kehutanan No. 49/KPTS-II/1997 dan keputusan Dirjen RRL No. 02/KPTS-V/1997 tentang pendanaan dan usaha hutan rakyat yang memungkinkan petani mendapatkan dana

reboisasi melalui kredit usaha sama sekali belum dimanfaatkan oleh petani. Demikian pula dalam bidang pemasaran, keberadaan PERDA No. 09 tahun 1996 tentang pengelolaan hutan rakyat di Sulsel dan petunjuk pelaksanaan melalui SK Gubernur TK. I Sulsel No. 494 tahun 1996. terlihat bahwa system pemasaran dengan pola kemitraan seperti yang diisyaratkan dalam PERDA tersebut belum dijumpai dalam hutan kemiri rakyat. Sementara itu kelembagaan formal seperti kehutanan, PEMDA, koperasi, LKMD, kelompok tani, juga tidak berperan atau terlibat dalam pengelolaan kemiri. Petani lebih memilih menjual kemirinya langsung ke pedagang daripada ke KUD, karena harga pembelian KUD ternyata lebih rendah dari harga pasar (Yusran, 1999).

Sedangkan peran pihak kehutanan dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat ternyata bersifat disinsentif bagi petani kemiri, karena cenderung di lihat sebagai pihak yang membatasi atau menghalangi petani dalam pengelolaan khususnya dalam peremajaan pohon kemiri. Hal tersebut di atas menunjukkan efektifitas dan dukungan kelembagaan formal yang ada belum berfungsi dengan baik (Litbang, 2003).

B. Hutan Kemiri Rakyat di Kabupaten Maros

1. Karakteristik Kemiri (*Aleurites mollucana*)

Kemiri adalah jenis pohon asli dari Malaya yang menyebar luas di daerah tropika, baik ditanam maupun yang tumbuh secara alami (Dali dan Gintings, 1981). Adapula yang berpendapat bahwa kemiri itu adalah tumbuhan asli dari

kepulauan pasifik seperti kepulauan Hawaii. Oleh penyebaran kemiri secara luas itu menyulitkan penentuan tempat asal yang sebenarnya, karena orang-orang telah menyebarkan kemiri secara besar-besaran sejak lama.

Tanaman kemiri dapat tumbuh dengan baik pada tanah-tanah kapur, tanah berpasir di pantai. Tetapi tanaman kemiri juga dapat tumbuh pada tanah podsolik yang kurang subur, sampai yang subur dan pada tanah-tanah litosol. Di Indonesia kemiri tersebar hampir di pelosok nusantara dengan jumlah terbanyak ada di Sulawesi selatan, Jawa, Maluku dan Sumatera utara. Kemiri di kebun-kebun untuk memperoleh buah, sedangkan Kehutanan menanamnya untuk menghasilkan kayu, terutama di Jawa Timur (Sunanto, 1994).

Menurut Paimin (1997), bahwa bertanam kemiri tidaklah sulit, sama seperti bertanam tanaman keras lainnya. Lagipula, karena bukan tanaman manja tidak dirawat sekalipun kemiri masih dapat tumbuh dan berbuah baik. Buktinya, rata-rata kemiri yang dijual di pasar adalah hasil panen dari tanaman yang tumbuh di pinggir hutan atau di tempat-tempat yang tidak dirawat khusus. Meskipun demikian, jika ingin mendapatkan produksi buah yang maksimal, sebaiknya diperhatikan teknis budidaya yang tepat. Teknis budidaya tersebut mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga panen.

2. Potensi Hutan Kemiri Rakyat di Kabupaten Maros

Hutan rakyat di Indonesia mempunyai potensi besar yang mampu menyediakan bahan baku industri kehutanan. Diperkirakan potensi kayu rakyat tersebut mencapai 38.416.557 m³ dengan luas 1.560.229 ha.

Luas hutan rakyat di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan tahun 1996/1997 adalah seluas 244.611 ha yang didominasi oleh jenis jati dan kemiri (Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan, 1996/1997). Hal ini menunjukkan bahwa hutan rakyat merupakan sumber potensial untuk memenuhi kebutuhan kayu masyarakat dan sumber bahan baku untuk industri kehutanan.

Kabupaten Maros adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang mempunyai potensi hutan kemiri terbesar diantara kabupaten lainnya seluas 9.279 ha dan produksinya 5.607 ton. Jumlah petani di daerah tersebut adalah 9.333 KK (Dinas Perdagangan Tk. II Maros, 1999).

Potensi hutan kemiri rakyat menurut Ginoga, dkk (1992) dalam Yusran (2005) produksi biji kemiri dari Sulawesi Selatan pada tahun 1989 adalah 11.742 ton dengan luas areal 31.331 ha atau 44% dari total produksi kemiri seluruh Indonesia yang berjumlah 26.767 ton dengan luas areal tanaman 84.500 ha. Sedangkan data statistik Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan (1997), menunjukkan luas hutan kemiri pada tahun 1997 adalah seluas 44.660 ha dengan jumlah produk 24.266 ton. Potensi hutan kemiri rakyat yang terbesar terdapat di kabupaten Maros dengan luas 9.350 ha dengan produksi 5.605 ton dengan jumlah petani 9.404 KK. Menurut hasil penelitian Yusran (1999) pada 4 desa di Kabupaten Maros menunjukkan bahwa rata-rata luas pemilikan lahan sebesar 1.87 ha dengan rata-rata volume pohon 169,63 m³ /ha.

Melihat potensi dan peranan yang cukup penting tersebut, maka akhir-akhir ini berbagai upaya mengembangkan hutan rakyat terus digalakkan, namun demikian sampai saat ini perkembangannya masih lambat. Hal ini disebabkan

antara lain karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam penerapan teknologi dan kurangnya perhatian dari pengambil keputusan dibidang kehutanan, terutama pembinaannya menyebabkan produktivitasnya yang rendah. Disamping itu terbatasnya data ekonomi yang dapat menggambarkan peranannya dalam kehidupan masyarakat dan sumbangannya dalam perekonomian nasional menyebabkan hutan rakyat kurang diperhitungkan.

C. Faktor yang Mempengaruhi Konversi Hutan Kemiri Rakyat

Perubahan pengelolaan hutan dapat diidentifikasi sebagai tuntutan dinamika pembangunan. Beberapa variabel masih relevan untuk dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu pertumbuhan ekonomi, biaya transport, perubahan teknologi, perubahan nilai dan pendapatan (Nugroho, 2004).

Pertumbuhan ekonomi akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan usahanya, sehingga akan memperluas lahan usahanya dari sebelumnya. Turunnya biaya transport dan perubahan teknologi dapat memberikan keuntungan lahan usaha pada jarak yang jauh dari pasar. Perubahan nilai yaitu orang mementingkan nilai konservasi menyebabkan orang akan menggunakan lahannya yang lebih konservatif. Sedangkan kenaikan pendapatan mempengaruhi seseorang untuk melakukan peningkatan pengeluarannya atau melakukan investasi yang lebih menguntungkan yang dapat mempengaruhi pola penggunaan lahan.

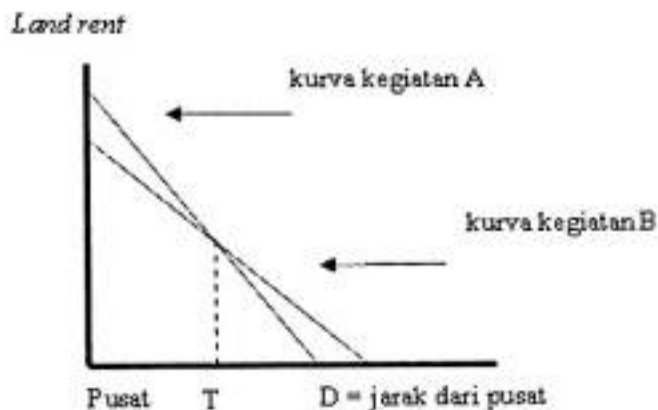
Suparna (2006) menyatakan bahwa laju konversi hutan (terutama pada hutan alam) di Indonesia antara lain disebabkan oleh :

1. Tekanan penduduk yang terus bertambah, mereka perlu lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan jalan keluarnya adalah membuka lahan hutan.
2. Jasa lingkungan dari hutan belum dihitung sebagai nilai ekonomi sehingga manfaat hutan dianggap tidak lebih penting dari kegiatan sektor lainnya.
3. Permasalahan kawasan hutan yang sangat kompleks, yang menyangkut tata ruang, rendahnya aksesibilitas, kelayakan ekonomi, kepemilikan lahan, sengketa lahan, koordinasi antar sektor, kesadaran terhadap nilai lingkungan dan konsistensi kebijakan.
4. Pengelolaan hutan yang belum berlandaskan prinsip-prinsip kelestarian.
5. Sistem pengelolaan hutan alam produksi mempunyai tingkat produktifitas yang sangat rendah

Hutan jati di pulau Jawa, juga mengalami penurunan kualitas tegakan akibat pencurian kayu dan kerusakan tanaman akibat pemanfaatan tumpang sari oleh masyarakat. Hal ini bersumber dari penambahan jumlah penduduk yang mendorong perluasan pemukiman dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan (Simon, 2000). Selanjutnya dikemukakan bahwa faktor kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan tekanan terhadap lahan hutan yang tinggi, karena kurangnya kesempatan kerja di luar sektor kehutanan/pertanian, rasio lahan pertanian per orang kecil yang menyebabkan terjadinya pengangguran dan kemiskinan di desa sekitar hutan.

D. Pengaruh Sewa Lahan (Land Rent) terhadap Konversi Hutan Rakyat

Penggunaan lahan suatu lokasi dipengaruhi oleh besarnya sewa atau keuntungan yang diperoleh dari suatu bentuk penggunaan lahan seperti pada gambar di bawah ini (Tarigan, 2005).



Kurva A menggambarkan kurva sewa lahan untuk kegiatan A (kegiatan non kehutanan) sedangkan kurva B (kegiatan hutan rakyat) menggambarkan kurva sewa lahan untuk kegiatan B karena perbedaan kurva sewa lahan pada kegiatan A dan B sampai jarak T dimungkinkan oleh kegiatan A, sedangkan melewati jarak T dimenangkan oleh kegiatan B, jadi perbedaan jarak dari pusat berpengaruh terhadap kegiatan penggunaan lahan.

Selain jarak dari pusat kota, juga tingkat kesuburan lahan menurut Ricardo turut mempengaruhi sewa lahan, utamanya pada lahan pertanian.

Terjadinya konversi/alih fungsi pada penggunaan lahan dapat disebabkan karena menurunnya sewa lahan untuk suatu pola penggunaan dan meningkatnya sewa pada penggunaan yang lain. Perubahan sewa lahan dapat disebabkan karena produktifitas lahan, biaya faktor produksi selain lahan, biaya pemasaran, dan harga komoditi. Konversi/alih fungsi pada penggunaan lahan A dan B karena sewa lahan B lebih tinggi.

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan selama bulan September – Oktober 2007 di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua masyarakat (petani) yang terdapat di Kelurahan Mario Pulana yang memiliki hutan kemiri rakyat. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan tehnik *purposive sampling* (uji petik secara pilih kasih) dengan kriteria ; warga biasa/tokoh masyarakat baik yang asli maupun pendatang pada lokasi penelitian, memiliki lahan hutan kemiri rakyat dan melakukan kegiatan konversi pada lahan hutan kemiri rakyat tersebut. Adapun jumlah responden yaitu sebanyak 30 orang.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara; digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat.

Metode wawancara yang dilakukan terdiri atas wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara dilakukan terhadap petani hutan kemiri rakyat dan masyarakat yang kena dampak dari hutan kemiri rakyat tersebut.

- b. Observasi lapangan dilakukan melalui pencatatan, pengukuran dan pengamatan terhadap studi yang diperkirakan mempengaruhi hasil penelitian. Observasi dilakukan guna memperoleh data tentang faktor yang mempengaruhi konversi hutan kemiri rakyat.

2. Jenis Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, dengan menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan, meliputi :
 - Jatidiri dan rumah tangga responden
 - Penguasaan lahan responden
 - Tingkat aksesibilitas lahan responden
 - Pendapatan responden
 - Proses dan bentuk konversi lahan yang dilakukan oleh responden
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka hasil-hasil penelitian sebelumnya, instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian, meliputi :
 - Keadaan fisik (letak, luas, topografi, tanah dan iklim)
 - Keadaan sosial ekonomi masyarakat (penduduk, pekerjaan, pendidikan, dan prasarana sosial dan ekonomi)

D. Analisis Data

Untuk mengetahui pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi hutan kemiri rakyat digunakan analisis sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui perkembangan konversi HKR dan arahan pola penggunaan lahan konversi hutan kemiri rakyat.

2. Analisis Pendapatan

Analisis pendapatan digunakan untuk mengetahui kontribusi pendapatan petani pada berbagai pola usaha tani dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Pd = TR - TC$$

Keterangan :

Pd = Pendapatan Usahatani

TR = Total Penerimaan

TC = Total Biaya

$$TR = \sum_{i=1}^n Q_i.P_i$$

Keterangan :

TR = Total Penerimaan

Q_i = Jumlah Output i

P_i = Harga Produk i

N = Macam Output

$$TC = \sum_{i=1}^n X_i \cdot P_{Xi}$$

Keterangan :

TC = Total Biaya

X_i = Jumlah Fisik dari Input yang membentuk Biaya

PX_i = Harga Input

n = Macam Input

3. Analisis Konversi

Analisis konversi digunakan untuk mengetahui tingkat konversi hutan kemiri tiap rumah tangga. Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Tingkat Konversi Hutan Kemiri} = \frac{\text{Luas Lahan Kemiri yang dikonversi}}{\text{Total Luas Lahan Kemiri}} \times 100 \%$$

4. Analisis faktor-faktor yg mempengaruhi konversi hutan kemiri rakyat

Analisis Regresi Berganda digunakan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap konversi hutan kemiri rakyat, dengan model persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan :

Y = Luas Lahan Kemiri yang dikonversi (ha)

a = Konstanta

b = Koefisien

X₁ = Jarak Lahan (Km)

X₂ = Pendapatan Sawah (Juta Rupiah)

X₃ = Luas Lahan Kemiri (ha)

X₄ = Luas Lahan non Kemiri (ha)

D. Konsep Operasional



Konsep operasional adalah batasan operasional dari berbagai istilah yang berhubungan dengan penelitian dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman mengenai pengertian dari istilah-istilah tersebut, maka berikut ini batasan pengertian dari beberapa istilah:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
2. Hutan Rakyat adalah hutan yang memiliki sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
3. Hutan Kemiri Rakyat (HKR) adalah areal hutan kemiri yang dikelola oleh masyarakat untuk memperoleh berbagai manfaat ekonomis, ekologi (lingkungan) dan sosial baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan
4. Konversi HKR adalah alih fungsi penggunaan lahan hutan kemiri rakyat ke penggunaan lain.
5. Sewa Lahan (land rent) adalah balas jasa terhadap faktor produksi lahan atau nilai atau harga yang dihubungkan dengan aset-aset yang memberikan aliran produksi dan jasa sepanjang lahan tersebut dipergunakan.
6. Lahan mencakup tanah, lapisan bawah tanah, karakteristik muka bumi (fisiografi), kemampuan menyediakan tempat berproduksi air, udara, dan komponen iklim lainnya.

7. Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melestarikan hutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan Negara dari hasil hutan berupa kayu dan non kayu.
8. Pendapatan Sawah adalah banyaknya pendapatan yang diperoleh masyarakat dari lahan sawah.
9. Jarak lahan adalah jarak antara rumah responden dengan lahan hutan kemiri.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kadaan Fisik Wilayah

1. Letak dan Luas

Kelurahan Mario Pulana merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, dengan luas $\pm 16,70 \text{ km}^2$ yang berada pada ketinggian 320 m dari permukaan laut . Kelurahan Mario Pulana terletak $\pm 54 \text{ km}$ dari ibukota Kabupaten Maros (Badan Pusat Statistika Makassar, 2007)

Batas-batas wilayah administratif Kelurahan Mario Pulana adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Pattanyamang
- b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Sawaru
- c. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Padaelo Kecamatan Mallawa
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kelurahan Cempaniga

2. Topografi

Secara umum kondisi topografi di Kelurahan Mario Pulana bervariasi dari datar sampai pegunungan dengan ketinggian antara 320 – 720 m dari permukaan laut dengan kondisi kelerengan 0% - 45%.

3. Iklim

Mohr atau Schmidt dan Ferguson membagi tiga bulan berdasarkan parameter derajat kebasahan dan kekeringan setiap bulannya, yaitu :

- a. Bulan Basah (BB) jika curah hujan setiap bulannya $> 100 \text{ mm}$
- b. Bulan Lembab (BL) jika curah hujan setiap bulannya antara 60 – 100 mm
- c. Bulan Kering (BK) jika curah hujan setiap bulannya $< 60 \text{ mm}$

Berdasarkan tiga parameter tersebut selanjutnya Schmidt dan Ferguson membagi iklim ke dalam delapan tipe. Untuk lebih jelasnya kedelapan tipe iklim yang dimaksud dapat di lihat pada Table 1. Data Curah Hujan selama sepuluh tahun terakhir di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba dapat di lihat pada Tabel 2.

Table 1. Pembagian Tipe Iklim Berdasarkan Q Ratio Menurut Schmidt dan Ferguson

Tipe Iklim	Q Ratio	Kriteria
A	0.0 – 14.3	Amat Basah
B	14.3 – 33.3	Basah
C	33.3 – 60.0	Agak Basah
D	60.0 – 100.0	Sedang
E	100.0 – 167.0	Agak Kering
F	167.0 – 300.0	Kering
G	300.0 – 700.0	Kering Sekali
H	> 700	Ekstra Kering

Sumber : Junus dkk, 1984.

Tabel 2. Data Curah Hujan selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros (1997 – 2006).

Bulan	Tahun										Rata ²
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Jan	37	310	462	276	96	398	839	0	71	538	302,7
Feb	109	155	395	203	323	205	384	0	348	-	212,2
Mar	182	130	232	124	90	251	235	0	393	-	163,7
Apr	141	167	179	176	25	69	287	0	155	88	128,7
Mei	25	34	167	184	28	226	51	0	18	88	82,1
Jun	63	28	87	154	39	4	41	-	17	145	57,8
Jul	82	42	54	45	16	-	0	-	-	2	24,1
Agust	-	15	34	32	-	-	14	-	-	-	9,5
Sept	-	-	13	9	1	1	66	-	-	-	9
Okt	-	-	253	32	38	-	99	-	-	-	42,2
Nov	41	-	256	189	190	319	193	89	175	-	145,2
Des	20	-	431	292	52	-	137	780	283	-	199,5
Total	700	881	2563	1716	898	1473	2346	869	1460	861	1376,7

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, 2007.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Kelas I Maros Periode 1997 – 2006 dapat dilihat rata-rata curah hujan tahunan. Nilai rata-rata bulan basah, bulan kering dan bulan lembab selama sepuluh tahun terakhir di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel 3.

Table 3. Nilai Rata-rata Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

Tahun	Jumlah Bulan		
	Jumlah Bulan Basah	Jumlah Bulan Kering	Jumlah Bulan Lembab
1997	3	4	2
1998	4	4	-
1999	8	3	1
2000	8	4	-
2001	2	7	2
2002	5	2	1
2003	6	3	2
2004	1	1	5
2005	5	2	1
2006	2	1	2
Jumlah	44	31	16
Rata-rata	4,4	3,1	1,6

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir jumlah bulan basah 44 dengan rata-rata 4,4 bulan kering sebanyak 31 dengan rata-rata 3,1 dan bulan lembab sebanyak 16 dengan rata-rata 1,6. Menurut Schmidt & Ferguson dalam Junus, dkk (1984), untuk mengetahui tipe iklim digunakan patokan nilai Q dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 Q &= \frac{\text{Rata-rata bulan kering}}{\text{Rata-rata bulan basah}} \times 100 \% \\
 &= \frac{3,1}{4,4} \times 100 \% \\
 &= 70,45 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penggolongan iklim dari Schmidt dan Ferguson, maka tipe iklim di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros termasuk ke dalam tipe iklim D, dengan nilai Q berkisar antara 60,0% - 100,0% dengan kriteria sedang.

B. Keadaan Sosial Ekonomi

1. Penduduk

Penduduk merupakan salah satu sumberdaya yang sangat dibutuhkan peranannya dalam pembangunan daerah. Menurut pendataan Kantor Kelurahan Mario Puolana, jumlah penduduk Kelurahan Mario Pulana sampai akhir tahun 2006 tercatat sebanyak 1.375 jiwa yang terdiri atas 677 pria dan 698 wanita dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 312 KK. Lebih jelasnya jumlah penduduk menurut tingkat umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.

Table 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Pria (Jiwa)	Wanita (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0 – 4	80	62	142
2	5 – 9	80	73	153
3	10 – 14	80	62	142
4	15 – 19	62	118	180
5	20 – 24	50	59	109
6	25 – 29	52	95	147
7	30 – 34	59	49	108
8	35 – 39	48	37	85
9	40 – 44	41	32	73
10	45 – 49	35	28	63
11	50 – 54	25	22	47
12	55 – 59	17	15	32
13	60 – 64	19	25	44
14	> 65	29	21	50
Jumlah		677	698	1.375

Sumber : Badan Pusat Statistik Makassar, 2007

2. Mata Pencaharian

Masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros sebagian besar merupakan masyarakat agraris, meskipun demikian memiliki keragaman mata pencaharian. Untuk lebih jelasnya, data mata pencaharian penduduk Kelurahan Mario Pulana dapat di lihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

No	Status	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Petani	227	71.84
2.	PNS/ABRI	39	12.34
3.	Pedagang	7	2.22
4.	Pengrajin	-	0
5.	Pekerja swasta/buruh	18	5.70
6.	Peternak	17	5.38
7.	Lainnya	8	2.53
Total		316	100

Sumber : Kantor Kelurahan Mario Pulana, 2007.

Tabel 5. menunjukkan bahwa sumber mata pencaharian penduduk desa Sawaru sebagian besar sebagai petani yaitu 227 orang atau sebesar 71,84%, sementara itu sumber mata pencaharian yang paling sedikit dilakukan adalah pedagang yaitu 7 orang atau 2,22 %. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi sumber penghidupan masyarakat Kelurahan Mario Pulana dibandingkan dengan jenis mata pencaharian yang lain.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Mario Pulana tergolong rendah tercatat 112 orang tidak tamat SD, tamat SD 905 orang, tamat SMP 102 orang, tamat SMA 173 orang, tamat D2/D3 16 orang dan tamat D4/S1 28 orang. Untuk lenih jelasnya tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Tamat SD	112
2.	Tamat SD	905
3.	SLTP	102
4.	SLTA	173
5.	D2 / D3	16
6.	D4 / S1	28
7.	S2 / S3	0
Total		1336

Sumber : Kantor Kelurahan Mario Pulana, 2007

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Secara umum, sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Mario Pulana masih sangat minim. Untuk sarana dan prasarana pendidikan masih kurang memadai hal ini dapat dilihat dari jumlah unit sekolah yang tersedia yaitu TK 1 unit, SD 2 unit, dan SLTA 1 unit, sementara SLTP tidak tersedia sehingga para siswa yang ingin melanjutkan sekolahnya di tingkat menengah pertama harus bersekolah di tempat lain. Selain itu tidak terdapat sarana kesehatan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat. Fasilitas perekonomian masyarakat tidak tersedia dalam hal ini pasar. Fasilitas peribadatan berupa 4 buah mesjid. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	1 buah
2.	Sekolah Dasar (SD)/SD Inpres	2 buah
3.	Sekolah Menengah Umum (SMU)	1 Buah
3.	Kantor Kelurahan	1 buah
4.	Masjid	4 buah
5.	Pasar	-
6.	Puskesmas	-
7.	Pos Keamanan (Hansip)	2 buah
Total		11 buah

Sumber : Badan Pusat Statistik Makassar, 2007

5. Peruntukan Lahan

Penggunaan lahan di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros umumnya berupa sawah baik yang dialiri dengan pengairan non teknis maupun tadah hujan, masing-masing 143.69 ha dan 17.00 ha, perkebunan 58.85 ha. Adapun perincian dan penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

Tabel 8. Peruntukan Lahan Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persen (%)
1.	Sawah irigasi non teknis	143.69	15.23
2.	Sawah tadah hujan	17.00	1.80
3.	Ladang, huma, tegalan, tambak, kolam	7.46	0.79
4.	Perkebunan	58.85	6.24
5.	Hutan Rakyat	660.37	69.97
6.	Perumahan/pemukiman	49.06	5.20
7.	Industri/kantor/pertokoan	2.00	0.21
8.	Lainnya	5.30	0.56
9.	Jumlah	943.73	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, Maros, 2007.

Pada Tabel 8. di atas menunjukkan bahwa sekitar 69.97 % penggunaan lahan di Kelurahan Mario Pulana di dominasi oleh Hutan Kemiri Rakyat dan sekitar 0.56 % tidak jelas penggunaan lahannya. Jika dikaitkan pada sektor mata pencaharian masyarakat pada umumnya bekerja pada sektor pertanian maka luas lahan yang digunakan sebesar 887.37 ha (94.03 %) yang diperuntukkan pada areal sawah irigasi non teknis, sawah tadah hujan, kolam/tambak, perkebunan dan hutan rakyat/kemiri.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat

Hutan Kemiri Rakyat (HKR) dikembangkan sejak tahun 1826 oleh masyarakat etnis bugis yang bermigrasi dari Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Issosong Lamappaselling putra Raja Bone XVII dengan membawa pengikut yang banyak pada saat pertama datang. Issosong, juga digelar sebagai Arung Punagi Pertama. Ia mendirikan istana kerajaan di *Baholiang* yang berarti istana dibawah gua. Tempat tersebut sekarang ini dinamakan Dusun Aholiang, Desa Cenrana, Kecamatan Camba. Tujuan utama mereka melakukan migrasi dari Kerajaan Bone adalah melakukan penanaman kemiri dengan bekerjasama Kompeni Belanda (VOC) untuk melakukan ekspor ke Negeri Belanda dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi rempah-rempah masyarakat Eropa pada masa itu. Pertama kali Issosong datang, dia memerintahkan kepada pengikutnya untuk menanam kemiri pada lahan yang berbukit sampai bergunung dan mengajak penduduk asli untuk melakukan hal yang sama. Pada tanah yang datar dibuat sawah untuk menanam padi untuk konsumsi sendiri (Alam, 2007).

Masyarakat desa di sekitar kawasan HKR membangun hutan kemiri di lahan miliknya maupun membuka areal berhutan atau semak belukar dengan menanam tanaman pokok kemiri secara tumpangsari. Tanaman semusim ditanam bersamaan pada saat awal pembukaan lahan selama 3 - 4 tahun. Tanaman semusim yang ditanam antara lain: padi, kacang tanah, cabe, tomat, sayuran, ubi dan pisang. Tanaman tahunan yang ditanam selain tanaman kemiri adalah tanaman jati sebagai tanaman pagar (pembatas kepemilikan). Setelah tanaman

kemiri tidak produktif lagi, petani meremajakan tanaman kemirinya dengan sistim tumpangsari seperti pada awal pembangunannya dan sistim ini dapat menjamin keberlanjutan pengelolaan HKR sampai tahun 1980an.

Pada Tahun 1920-an terjadi perluasan penanaman kemiri kembali digalakkan lagi yang dilakukan secara berkelompok dengan persetujuan kepala kampung sebagai tokoh adat dan tokoh pemerintahan. Pada masa itu juga oleh pemerintah Belanda telah membentuk polisi hutan (*bussweissen*) dan masyarakat setempat mengenalnya dengan nama "*Tuan Pa*". Pada masa itu oleh Pemerintah Belanda dibuat batas kawasan hutan antara hutan yang dikelola rakyat yang berupa hutan kemiri yang berada di bawah bukit dan hutan alam yang tidak bisa dimanfaatkan yang terletak di atas bukit. Tanda batas tersebut dibuatkan jalan setapak (*balatu*) rintisan Tuan Pa' yang membatasi HKR dengan hutan alam tersebut. Patok batas kawasan hutan alam dapat ditemukan tanda-tandanya di lapangan sekarang ini, meskipun jalan setapak yang telah dibuat pada saat ini telah ditumbuhi semak belukar. Batas kawasan hutan tersebut ditaati oleh masyarakat dan sampai sekarang masyarakat mengenalnya batas kawasan hutan dengan lahan masyarakat yang dibuat Pemerintahan Belanda (*Tuan Pa*").

Perkembangan penduduk yang diiringi kebutuhan pangan yang semakin meningkat, maka pada tahun 1960-an sebagian areal HKR dijadikan ladang, sebagai akibat masyarakat melakukan pengungsian ke dalam kawasan hutan untuk menghindari perang antara gerombolan dengan TNI. Demikian pula halnya banyak hutan kemiri, sawah dan pemukiman ditinggalkan oleh masyarakat untuk

mendekat ke jalan raya untuk menghindari gerombolan yang menguasai perkampungan terpencil, sehingga beberapa perkampungan yang dulunya terpencar- pencar dalam kawasan HKR, sekarang ini ditinggalkan penduduknya.

Sejak awal tahun 1980-an, hutan kemiri mulai ditumpangsari dengan jenis tanaman yang bernilai ekonomi tinggi seperti tanaman kopi dengan cara menanam tanaman kopi di bawah tegakan kemiri, namun pada tahun 1990-an harga kopi turun, sehingga pola tumpangsari ini tidak berkembang. Akhir tahun 1980-an juga masyarakat mulai mengembangkan tanaman kakao di pekarangan rumah penduduk.

Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter di Asia dan dampaknya paling besar di Indonesia, mendorong terjadinya kenaikan harga kakao dalam nilai mata uang rupiah dari harga Rp 2.000 sebelum krismon sampai mencapai harga Rp 14.000 pada puncak krismon. Lonjakan harga tersebut mendorong petani memperluas tanaman kakaonya dengan cara mengkonversi tanaman kemirinya menjadi kebun kakao atau pada kemiri yang masih produktif petani menanam kakao dibawah tegakan kemiri. Namun dalam kegiatan tumpangsari kakao di bawah kemiri ini, tidak dapat bertahan lama, karena tanaman kakao pada saat mencapai umur 6 tahun, sudah terjadi persaingan cahaya dengan tanaman kemiri untuk berproduksi. Sementara pohon kemirinya semakin tua sehingga tidak produktif lagi, akhirnya petani memilih menjarangi tanaman kemirinya dengan mematikan sebagian pohon kemirinya dan bahkan sebagian petani sudah mematikan seluruh tanaman kemirinya untuk memberikan ruang tumbuh pada tanaman kakaonya. Kegiatan pemusnahan tanaman kemiri diperparah dengan

adanya anggapan yang berkembang bahwa penyebab terserangnya Penyakit Buah Kakao (PBK) sebagai akibat ternaunginya tanaman kakao . Tumpangsari tanaman kakao dengan tanaman kemiri berakhir dengan konversi HKR menjadi kebun kakao.

Pada Awal tahun 2000-an permintaan tanaman lombok dan tomat yang cukup tinggi karena berkembangnya perdagangan antar pulau bagi komoditi tersebut. Hal ini disebabkan terbukanya jalur penyeberangan Mamuju-Balikpapan sehingga mobil truk pengangkut barang dapat menjangkau kota-kota di pulau Kalimantan. Tingginya permintaan barang tersebut menyebabkan sebagian HKR dikonversi menjadi areal ladang untuk ditanami tanaman lombok dan tomat dengan menggunakan pupuk, obat dan tenaga kerja yang cukup besar. Kegiatan penanaman komoditi tersebut petani memperoleh pendapatan yang memuaskan, karena mereka hampir setiap minggu dapat memperoleh uang dari hasil penjualan tomat dan lombok. Adanya perbaikan ekonomi rumah tangga petani yang melakukan kegiatan tersebut, maka sebagian petani ikut melakukan kegiatan konversi HKR untuk melakukan kegiatan yang sama, terutama pada perkampungan yang mudah dijangkau kendaraan dan mempunyai tenaga kerja keluarga.

Pengelolaan HKR yang sudah berlangsung ratusan tahun dengan sistem tumpangsari tanaman semusim selama 3 – 4 tahun telah terbukti melestarikan hutan kemiri rakyat. Namun sejak Awal tahun 1990-an kegiatan konversi mulai dilakukan secara besar- besaran bersamaan dengan sebagian kawasan HKR tidak dapat diremajakan, sehingga HKR tidak produktif lagi dan banyaknya jenis komoditi yang mempunyai nilai pasar yang tinggi.

Semangat masyarakat membangun hutan kemiri sebelum tahun 1990-an didorong oleh beberapa faktor. Dari sisi ekonomi, didorong oleh faktor-faktor harga buah kemiri yang tinggi, harapan untuk memungut hasil, mudah dipasarkan, tidak memerlukan pemeliharaan, harga relatif stabil dan keinginan memiliki hutan kemiri untuk tabungan di hari tua. Sedangkan dari sisi sosial didorong oleh faktor-faktor keinginan menguasai lahan yang luas, penguasaan teknik budi daya, harapan untuk mewariskan lahan dan hasil hutan kepada turunannya, lahan sebagai simbol kelas sosial dalam masyarakat (yakni status seseorang diukur dari luas kepemilikan lahan, semakin luas lahan semakin tinggi status sosial).

B. Deskripsi Konversi Hutan Kemiri Rakyat

1. Pola Konversi Hutan Kemiri Rakyat

Pola penggunaan lahan di Kelurahan Mario Pulana terdiri atas areal untuk penggunaan persawahan, perladangan dan perkebunan. Pola penggunaan lahan pada areal persawahan umumnya dimanfaatkan untuk penanaman padi dan setelah padi dipanen kemudian ditanami kacang tanah, pada areal perladangan umumnya ditanami tanaman semusim seperti tomat, lombok, dan kacang-kacangan sedangkan pada areal perkebunan umumnya ditanami dengan kakao. Pada kelurahan Mario Pulana ini terdapat tiga kategori pola konversi lahan HKR yaitu pola penggunaan dari HKR ke ladang, pola penggunaan dari HKR ke kebun dan pola penggunaan dari HKR ke persawahan. Pola konversi HKR di Kelurahan Mario Pulana didominasi pada penggunaan dari HKR ke persawahan yaitu sebesar 53,33% sedangkan penggunaan HKR ke kebun (kakao) yaitu sebesar 43,33%, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Pola Konversi HKR di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

No	Pola Konversi	Jumlah (orang)	%
1.	HKR – Ladang	1	3,33
2.	HKR – Kebun (kakao)	13	43,33
3.	HKR – Persawahan	16	53,33
Σ		30	100,00

Pola konversi HKR ke penggunaan lahan usaha tani lain antara setiap petani berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan karakteristik usaha tani pada masing-masing pola konversi.

2. Tingkat Konversi Hutan Kemiri Rakyat

Besarnya jumlah persentase tingkat konversi HKR di Kelurahan Mario Pulana selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata tingkat konversi HKR di Kelurahan Mario Pulana yaitu 45,53% tiap rumah tangga, di mana 43,33% diantaranya merupakan tingkat konversi HKR yang tergolong tinggi dan 56,67% merupakan tingkat konversi HKR yang tergolong rendah. Rendahnya tingkat konversi hutan kemiri yang dilakukan petani disebabkan karena keinginan masyarakat untuk mengolah kembali lahan yang mereka miliki daripada membuka lahan baru (mengkonversi lahan HKR).

Tabel 10. Tingkat Konversi HKR di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

No	Tingkat Konversi HKR	Jumlah (orang)	%
1.	Tinggi (> 45,53 %)	13	43,33
2.	Rendah (< 45,53 %)	17	56,67
Σ		30	100,00

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya konversi HKR adalah keinginan untuk pemenuhan kebutuhan hidup tetapi di Kelurahan Mario Pulana masyarakat lebih memilih untuk mengolah ladang, sawah atau kebun yang berada dekat dengan areal pemukiman mereka.

3. Jarak Lahan

Konversi lahan HKR yang terjadi di Kelurahan Mario Pulana didukung oleh letak HKR yang dekat dengan pemukiman penduduk. Pada umumnya penduduk melakukan konversi terhadap lahan HKR yang berada dekat dengan pemukiman mereka karena alasan keamanan dan keterjangkauan lahan serta dapat mempermudah dalam hal pemasaran hasil produksi. Dekatnya lahan dari pemukiman membuat penduduk dapat mengakses lahannya tersebut dengan lebih cepat sehingga sangat membantu dalam mengatasi gangguan hama (babi hutan, monyet, dan ternak sapi). Selain itu juga akan mempermudah penduduk dalam hal pengangkutan hasil produksi yang selanjutnya akan dijual ke pedagang besar atau langsung dipasarkan ke pasar lokal.

Rata-rata jarak lahan yang dimiliki oleh petani adalah 1,35 km, jarak ini merupakan jarak yang cukup dekat. Petani yang memiliki jarak lahan kurang dari 1,35 km berjumlah 20 orang, sementara itu petani yang memiliki jarak lahan lebih dari 1,35 km sebanyak 10 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Jarak Lahan HKR di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

No	Jarak Lahan (km)	Jumlah (orang)	%	Kriteria	Rata-rata Jarak Lahan (km)
1.	≤ 1,35	20	66,67	Dekat	1,35
2.	> 1,35	10	33,33	Jauh	
Σ		30	100,00		

4. Pendapatan Sawah

Faktor yang berpengaruh terhadap konversi HKR selain jarak lahan adalah pendapatan sawah. Pola penggunaan sawah merupakan pola penggunaan lahan yang dapat memberikan hasil dalam jangka waktu yang relatif singkat, selain itu hasil yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari HKR, sehingga hal ini menjadi daya tarik bagi petani untuk mengkonversi lahannya ke bentuk lahan sawah.

Tabel 12. Rata-rata Pendapatan Petani dari berbagai Pola Usaha Tani

Rata-rata Pendapatan			
Kemiri	Sawah	Kebun	Ladang
Rp 1.206.000	Rp 2.725.417	Rp 738.167	Rp 358.200

Pada Tabel 12 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan terbesar yang diterima oleh petani berasal dari sawah sebesar Rp 2.725.417, sedangkan rata-rata pendapatan terkecil berasal dari ladang sebesar Rp 358.200. Pendapatan yang diterima petani dari pola penggunaan sawah lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima dari kemiri, kebun, dan ladang, hal inilah yang membuat para petani tertarik untuk mengkonversi lahan HKRnya ke penggunaan persawahan.

Pendapatan yang diperoleh petani dari pola penggunaan sawah cukup bervariasi < Rp 1.000.000 - > Rp 2.000.000. Namun pada umumnya petani memperoleh pendapatan sawah di atas Rp 2.000.000, sementara itu rata-rata pendapatan sawah yang diperoleh petani adalah Rp 2.750.000, seperti yang tampak pada Tabel 13.

Tabel 13. Pendapatan Sawah Petani di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

No	Pendapatan Sawah (Rp)	Jumlah (orang)	Kriteria	Rata-rata Pendapatan Sawah (Rp)
1.	< Rp 1.000.000	7	Rendah	2.725.000
2.	1.000.000 – 2.000.000	9	Sedang	
3.	> 2.000.000	14	Tinggi	
Σ		30		

5. Luas Lahan Kemiri dan non Kemiri

Luas lahan yang dimiliki penduduk baik lahan kemiri maupun non kemiri turut memberikan sumbangsih dalam kegiatan pengkonversian HKR. Kondisi tegakan kemiri yang sudah tua sehingga tidak produktif lagi dan mudah terserang hama (benalu) membuat penduduk mengkonversi sebagian atau bahkan seluruh luasan lahan HKR yang dimilikinya. Selain itu kecilnya luasan lahan non kemiri (sawah, ladang, kebun) yang dimiliki akan memancing penduduk untuk memperluas lahannya dengan cara mengkonversi lahan HKR. Hal ini disebabkan karna penggunaan lahan selain HKR khususnya lahan sawah dan kebun memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan HKR itu sendiri.

Rata-rata luas lahan kemiri yang dimiliki oleh petani di Kelurahan Mario Pulana yaitu 2,06 ha, sedangkan rata-rata luas lahan lahan non kemiri yang dimiliki oleh petani adalah 1,6 ha, namun pada umumnya petani hanya memiliki luasan lahan yang lebih sempit, yaitu berkisar antara 0,5 – 1,5 ha. Pembagian luas lahan kemiri dan non kemiri dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Luas Lahan Kemiri dan non Kemiri di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

No	Kemiri		Non Kemiri		Rata-rata Pemilikan Lahan	
	Luas (ha)	Jumlah (orang)	Luas (ha)	Jumlah (orang)	Kemiri (ha)	Non Kemiri (ha)
1.	0,5 – 1,5	14	0,5 – 1,5	20	2,06	1,6
2.	1,6 – 3	12	1,6 – 3	6		
3.	> 3	4	> 3	4		
	Σ	30		30		

C. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Konversi HKR

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 4 variabel yang diduga mempengaruhi konversi HKR di Kelurahan Mario Pulana. Variabel-variabel ini antara lain adalah jarak lahan (X1), pendapatan bersih sawah (X2), luas lahan kemiri (X3), dan luas lahan non kemiri (X4).

1. Analisis Regresi Berganda (*Full Model Regression*)

Variabel-variabel yang terdapat di atas kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut terhadap konversi hutan kemiri rakyat. Hasil analisis regresi dengan memasukkan 4 variabel bebas yang ada (*full model regression*) menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,019 - 0,174X_1 + 0,078X_2 + 0,311X_3 - 0,115X_4$$

Analisis regresi menunjukkan bahwa dari keempat Variabel bebas yang dianalisis hanya ada tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap konversi hutan kemiri dalam hal ini luas lahan kemiri yang dikonversi, sedangkan konstanta dan salah satu variabel bebas (X4) tidak berpengaruh signifikan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,609, hal ini memberikan arti 60,9% konversi

hutan kemiri dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas tersebut. Sedangkan sisanya ($100\% - 60,9\% = 39,1\%$) dijelaskan oleh faktor lain. Hal ini memberikan informasi bahwa masih terdapat beberapa variabel bebas lain ($39,1\%$) yang diduga berpengaruh terhadap konversi hutan kemiri rakyat yang tidak teranalisis. Untuk melihat pengaruh setiap variabel bebas (X_i) terhadap konversi hutan kemiri rakyat (Y) secara individu disajikan pada Tabel 15 berikut ini.

Tabel 15. Hasil analisis regresi berganda (*full model regresion*) terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi konversi hutan kemiri rakyat

Variabel	Koefisien	T.Student	P Sig.
Konstan	0,019	0,099	0,922
X_1	-0,174	-2,394	0,025
X_2	0,078	1,905	0,068
X_3	0,311	3,427	0,002
X_4	-0,115	-0,111	0,310

Nilai koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas menunjukkan besarnya peningkatan atau penurunan nilai variabel tak bebas (Y) apabila nilai variabel bebas yang bersangkutan naik atau turun sebesar satu satuan, sedangkan nilai variabel bebas lainnya tetap.

2. Hubungan Jarak Lahan dengan Konversi HKR

Berdasarkan analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk jarak lahan adalah sebesar $-0,174$. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan jarak lahan akan menurunkan konversi hutan kemiri rakyat sebesar $0,174$. Penurunan konversi HKR ini disebabkan karena semakin jauh jarak lahan lahan maka akan membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak untuk menjangkau lahan tersebut, sementara itu masyarakat lebih cenderung untuk

mengolah lahan yang berada dekat dari pemukiman mereka karena memberikan kemudahan dalam hal keamanan, keterjangkauan lahan, dan pengangkutan hasil hutan.

Tabel 16. Hubungan Jarak lahan dengan konversi HKR

Jarak Lahan (km)	Luas Lahan Kemiri yang dikonversi (ha)		
	< 0,5	0,5 - 1	> 1
< 1	1 orang	7 orang	1 orang
1 - 2	3 orang	11 orang	4 orang
> 2	1 orang	1 orang	1 orang

Pada Tabel 16 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang melakukan konversi pada jarak < 1 dan 1 – 2 km sebanyak 27 orang, jumlah ini lebih banyak dari pada jumlah penduduk yang melakukan konversi pada jarak > 2 km yang hanya berjumlah 3 orang. Hal ini sejalan dengan analisis regresi yang menunjukkan bahwa semakin jauh jarak lahan maka akan menurunkan konversi HKR.

3. Hubungan Pendapatan Sawah dengan Konversi HKR

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk pendapatan sawah adalah sebesar 0,078. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pendapatan sawah akan meningkatkan konversi hutan kemiri rakyat sebesar 0,078. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan sawah akan meningkatkan konversi HKR. Pada umumnya masyarakat menginginkan pendapatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, oleh sebab itu mereka lebih memilih untuk mengkonversi lahan HKRnya ke bentuk lahan sawah karena hasil yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pola penggunaan lahan lainnya.

Tabel 17. Hubungan Pendapatan Sawah dengan konversi HKR

Pendapatan Sawah (Juta Rupiah)	Luas Lahan Kemiri yang dikonversi (ha)		
	< 0,5	0,5 - 1	> 1
< 1	-	6 orang	1 orang
1 - 2	2 orang	5 orang	2 orang
> 2	2 orang	9 orang	3 orang

Pada Tabel 17 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang memperoleh pendapatan 1 – 2 juta rupiah pada lahan kemiri yang telah dikonversi menjadi sawah sebanyak 9 orang dan penduduk yang memperoleh pendapatan > 2 juta rupiah sebanyak 14 orang, sementara itu penduduk yang memperoleh pendapatan < 1 juta rupiah hanya 7 orang. Hal ini sesuai dengan analisis regresi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan sawah akan meningkatkan konversi HKR.

4. Hubungan Luas Lahan Kemiri dengan Konversi HKR

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk luas lahan kemiri adalah sebesar 0,311. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan luas lahan kemiri akan meningkatkan konversi HKR sebesar 0,311. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas lahan kemiri akan meningkatkan konversi HKR. Pada saat ini tegakan kemiri yang ada di lahan HKR masyarakat sudah tidak produktif lagi, selain itu umur tegakan kemiri tersebut sudah tua sehingga mudah terserang hama (benalu). Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk mengkonversi lahan HKRnya ke pola penggunaan lain, sehingga semakin luas lahan kemiri yang sudah tidak produktif lagi maka semakin besar kemungkinannya untuk dikonversi.

Tabel 18. Hubungan Luas lahan Kemiri dengan konversi HKR

Luas Lahan Kemiri (ha)	Luas Lahan Kemiri yang dikonversi (ha)		
	< 0,5	0,5 - 1	> 1
< 0,5	-	-	-
0,5 - 1	3 orang	8 orang	-
> 1	2 orang	11 orang	6 orang

Pada Tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang melakukan konversi pada luas lahan kemiri 0,5 – 1 ha sebanyak 11 orang sedangkan pada luas lahan kemiri > 1 ha sebanyak 19 orang. Hal ini sejalan dengan analisis regresi yang menunjukkan bahwa semakin luas lahan kemiri akan meningkatkan konversi HKR.

5. Hubungan Luas Lahan non Kemiri dengan Konversi HKR

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk luas lahan non kemiri adalah sebesar -0,115. Hal ini berarti bahwa semakin luas lahan non kemiri akan menurunkan konversi lahan HKR. Namun berdasarkan analisis regresi menunjukkan luas lahan non kemiri tidak berpengaruh terhadap konversi lahan HKR.

Tabel 19. Hubungan Luas lahan non Kemiri dengan konversi HKR

Luas Lahan non Kemiri (ha)	Luas Lahan Kemiri yang dikonversi (ha)		
	< 0,5	0,5 - 1	> 1
< 0,5	3 orang	-	-
0,5 - 1	2 orang	9 orang	-
> 1	-	10 orang	6 orang

Pada Tabel 19 di atas menunjukkan bahwa semakin luas lahan non kemiri maka akan meningkatkan konversi HKR. Hal ini tidak sejalan dengan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa semakin luas lahan non kemiri akan

menurunkan konversi HKR. Hal inilah yang menyebabkan faktor luas lahan non kemiri tidak berpengaruh signifikan terhadap konversi HKR berdasarkan analisis regresi.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola konversi lahan Hutan Kemiri Rakyat (HKR) di Kelurahan Mario Pulana terdiri atas tiga pola konversi yaitu pola konversi HKR ke penggunaan ladang, pola konversi HKR ke penggunaan kebun (kakao) dan pola konversi HKR ke penggunaan persawahan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi konversi HKR di Kelurahan Mario Pulana ada tiga faktor, yang pertama adalah jarak lahan, semakin jauh jarak lahan HKR dari pemukiman penduduk akan semakin menurunkan tingkat konversi HKR. Faktor yang kedua adalah pendapatan sawah, semakin tinggi pendapatan yang diterima dari pola penggunaan sawah maka akan semakin meningkatkan konversi HKR. Faktor yang ketiga adalah luas lahan kemiri, semakin luas lahan kemiri maka konversi HKR akan semakin meningkat.

B. Saran

Perlu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah agar mendorong kegiatan peningkatan produktivitas Hutan Kemiri Rakyat (HKR), untuk mengurangi tingkat konversi lahan HKR ke penggunaan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. 2007. *Pola Konversi dan Nilai Manfaat Hutan Kemiri Rakyat di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 2003. *Buletin Penelitian Kehutanan Vol 9 No.4*. Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Makassar.
- Dali, J. And Ginting,A.NG. 1981. *Cara Penanaman Kemiri*. Departemen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Lembaga Penelitian Hutan. Bogor.
- Departemen Kehutanan dan perkebunan 1999. *Undang-undang Nomor 41 Tentang Kehutanan*. Dephutbun, Jakarta.
- Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2005. *Data dan Informasi (Statistik) tahun 2004*. Makassar.
- Dinas Perdagangan, 1999. *Data Statistik Perdagangan Tahun 1997/1998*. Ujung Pandang.
- Djajapertjuanda, S. 1995. *Prospek Hutan Rakyat dalam Industri dan Perdagangan*. Makalah dalam rangka Seminar Nasional Hutan Rakyat Menuju Model Pemberdayaan dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan:Jakarta, 29 Agustus 1995.
- Nugroho, I dan Dahuri, R. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES: Jakarta.
- Paimin, F.Ruspandi, 1997. *Kemiri Budidaya dan Prospek Bisnis*. Penebar Swadaya (Cetakan II), Jakarta.
- Salim, H. S., 2003. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta
- Simon, H. 1995. *Strategi Pengembangan Pengelolaan Hutan Rakyat*. Makalah disampaikan Pada Diskusi Panel Pengembangan Hutan Rakyat : Bandung, 14-20 Januari 2005.
- _____, 1998. *Kehutanan Masyarakat di Indonesia*. Warta FKKM. No. 1 Tahun I. Yogyakarta.

- _____. 2000. *Hutan Jati dan Kemakmuran: Problematika dan Strategi Pemecahannya*. BIGRAF Publishing: Yogyakarta.
- Steenis, Van. C.G.G.J., 1987. *Flora Untuk Sekolah di Indonesia*. Pradya Paramitha. Jakarta.
- Suharjito, D., A. Khan., W.A. Djatmiko., M.T. Sirait., S. Evelyn, 2000. *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Aditya Medi. Yogyakarta.
- Sunanto, Hatta. 1994. *Budidaya Kemiri Komoditas Ekspor*. Kanisius, Yogyakarta..
- Supriadi, D. 2002. *Pengembangan Hutan Rakyat di Indonesia*. Jurnal Hutan Rakyat. 1:23-33.
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Yusran, 1999. *Analisis Model Pengelolaan Hutan Rakyat Kemiri di Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan [Tesis]*. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- _____, 2005. *Analisis Performansi dan Pengembangan Hutan Kemiri Rakyat di Kawasan Pegunungan Bulusaraung Sulawesi Selatan*. Disertasi tidak diterbitkan. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Petani Hutan Kemiri Rakyat

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Tgl. Wawancara :
 No. Responden :

1. Jati Diri Responden

Nama	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Wanita
Umur (tahun)	
Agama	
Suku	
Asli/Pendatang	(Asli/Pendatang)
Asal Desa (jika pendatang)	
Alasan Pindah (jika pendatang)	
Lama tinggal di desa (tahun)	
Pendidikan	
Pekerjaan Utama	
Pekerjaan Sampingan	
Jumlah Anggota Keluarga	
Jumlah Tanggungan Keluarga	
Status Ketokohan	Karaeng/Tetua Adat/Warga biasa
Anggota Kelompok Tani (sebutkan nama kelompok taninya)	

2. Rumah Tangga Responden

No	Uraian	Ukuran
1	Jumlah anggota keluarga	Org
2	Jumlah laki-laki	Org
3	Jumlah perempuan	Org
4	Pendidikan kepala keluarga	(SD/SMP/SMU/PT)
5	Lama menempuh pendidikan kepala keluarga	Tahun
6	Umur	Tahun
7	Lama berusaha tani	Tahun
8	Pekerjaan utama	
9	Pekerjaan sampingan	

1. Tingkat Aksesibilitas Lahan Hutan Kemiri Rakyat
 - a. Jarak dari rumah km
 - b. Jarak dari pasar (tempat penjualan) km
 - c. Waktu tempuh ke hutan kemiri rakyat jam
 - d. Waktu tempuh ke pasar jam
 - e. Biaya transport ke pasar untuk orang Rp/org
 - f. Biaya transport ke pasar untuk barang Rp/kg
2. Uraikan secara singkat proses dan bentuk konversi hutan kemiri rakyat serta alasan-alasan mengkonversi ?

3. Faktor apa yang menyebabkan mengkonversi HKR ?
 - a. Harga biji kemiri rendah (ya/tdk)
 - b. Harga biji kakao lebih mahal (ya/tdk)
 - c. Produksi biji kemiri menurun (ya/tdk)
 - d. Areal HKR tersebut memungkinkan dijadikan sawah, sehingga lebih menguntungkan (ya/tdk)
 - e. Tidak ada lahan lain untuk menanam tanaman pangan (ya/tdk)
 - f. Arealnya dekat dari rumah (ya/tdk)
4. Berapa luas lahan hutan kemiri yang dikonversi? dan digunakan untuk apa ?

5. Uraikan secara singkat tentang produktivitas lahan HKR :
 - a. Apakah mengalami penurunan atau peningkatan ? (ya/tdk)
 - b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan peningkatan atau penurunan produksi ?

7. Apa yang diharapkan dari Pemerintah Desa untuk meningkatkan pembangunan HKR ?

Lampiran 2. Identitas Responden

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan Utama	Pekerjaan Sampingan	Suku	Agama	Jumlah Anggota Keluarga
1	Abd. Salam	42	L	SD	Petani	-	Bugis	Islam	5
2	Jabir	45	L	SD	Petani	-	Bugis	Islam	6
3	Amiruddin	32	L	SMP	Petani	-	Bugis	Islam	5
4	Muh. Arif	51	L	SD	Petani	-	Bugis	Islam	4
5	Alwi	50	L	SMP	Petani	-	Bugis	Islam	4
6	H. Rahmani Lewa	69	L	SR	Petani	Pensiunan PNS	Bugis	Islam	2
7	H. Burahima	62	L	SR	Petani	-	Bugis	Islam	6
8	Mappakanro	48	L	SMP	Petani	Wiraswasta	Bugis	Islam	5
9	Firdaus	25	L	SMA	Petani	-	Bugis	Islam	3
10	Bundun	63	L	SR	Petani	-	Bugis	Islam	2
11	Hasan	40	L	SMA	PNS	Petani	Bugis	Islam	5
12	Rasta	30	L	SD	Petani	-	Bugis	Islam	4
13	Abd. Azis	54	L	SR	Petani	-	Bugis	Islam	3
14	Manggasali	55	L	SMP	Petani	Usaha Pabrik	Bugis	Islam	3
15	Pg. Lewa	80	L	SD	Petani	-	Bugis	Islam	4
16	H. Hasaning	65	L	SD	Petani	-	Bugis	Islam	6
17	Pati	65	P	SR	IRT	Berkebun	Bugis	Islam	2
18	Hawatia	45	P	SR	Petani	Berkebun	Bugis	Islam	3
19	Musdahir	25	L	SMP	Petani	Berkebun	Bugis	Islam	4
20	Ku'duse	44	L	SPG	Guru SD	Berkebun	Bugis	Islam	6
21	Amri	30	L	SMP	Petani	-	Bugis	Islam	6
22	Damang	27	L	SD	Petani	-	Bugis	Islam	3
23	Sahir	31	L	DI	berkebun	-	Bugis	Islam	5
24	A. Hamsah	35	L	SMP	berkebun	-	Bugis	Islam	4
25	H. Jayadi	41	L	SI	PNS	berkebun	Bugis	Islam	7
26	Abd. Gaffar	47	L	SPG	Guru SD	berkebun	Bugis	Islam	4
27	A. Abd. Salam	48	L	SI	Guru SMA	berkebun	Bugis	Islam	3
28	Hj. A. Chandra	55	P	SD	berkebun	-	Bugis	Islam	8
29	Jabal	30	L	SD	beternak	berkebun	Bugis	Islam	5
30	M. Bakri	51	L	SD	bertani	beternak	Bugis	Islam	7

Lampiran 3. Hasil Analisis Tingkat Konversi HKR tiap Rumah Tangga

No.	Nama Responden	Luas Total Kemiri (ha)	Luas yang dikonversi (ha)	Tingkat Konversi HKR (%)
1	Abd. Salam	3	3	100.00
2	Jabir	2	1.5	75.00
3	Amiruddin	2	0.16	8.00
4	Muh. Arif	1.5	0.5	33.33
5	Alwi	0.5	0.5	100.00
6	H. Rahmani Lewa	3	0.5	16.67
7	H. Burahima	3	1	33.33
8	Mappakanro	1	0.2	20.00
9	Firdaus	2	0.9	45.00
10	Bundun	1.5	0.75	50.00
11	Hasan	3	1	33.33
12	Rasta	4	0.5	12.50
13	Abd. Azis	2	0.7	35.00
14	Manggasali	4.7	2	42.55
15	Pg. Lewa	3	1	33.33
16	H. Hasaning	3	0.5	16.67
17	Pati	0.5	0.01	2.00
18	Hawatia	0.6	0.5	83.33
19	Musdahir	0.7	0.5	71.43
20	Ku'duse	1	0.55	55.00
21	Amri	0.5	0.1	20.00
22	Damang	1.2	0.1	8.33
23	Sahir	1	0.85	85.00
24	A. Hamsah	1	0.5	50.00
25	H. Jayadi	5	2	40.00
26	Abd. Gaffar	2	0.8	40.00
27	A. Abd. Salam	2	1.5	75.00
28	Hj. A. Chandra	1	0.5	50.00
29	Jabal	1	0.8	80.00
30	M. Bakri	5	2.55	51.00
Rata-rata				45.53

Lampiran 4. Jarak Lahan HKR

No.	Nama Responden	Jarak Lahan (km)
1	Abd. Salam	5
2	Jabir	2
3	Amiruddin	0.2
4	Muh. Arif	0.7
5	Alwi	0.15
6	H. Rahmani Lewa	0.1
7	H. Burahima	1.5
8	Mappakanro	4
9	Firdaus	1.5
10	Bundun	1
11	Hasan	5
12	Rasta	0.2
13	Abd. Azis	2
14	Manggasali	0.3
15	Pg. Lewa	2
16	H. Hasaning	0.6
17	Pati	1
18	Hawatia	0.05
19	Musdahir	0.05
20	Ku'duse	1
21	Amri	1
22	Damang	1
23	Sahir	2
24	A. Hamsah	2
25	H. Jayadi	1
26	Abd. Gaffar	1
27	A. Abd. Salam	1
28	Hj. A. Chandra	1
29	Jabal	1
30	M. Bakri	1
Rata-rata		1.35

Lampiran 5. Pendapatan Responden dari berbagai Pola Usaha Tani

No.	Nama Responden	Pendapatan Bersih Kemiri (Rp)	Pendapatan Bersih Sawah (Rp)	Pendapatan Bersih Kebun (Rp)	Pendapatan Bersih Ladang (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
1	Abd. Salam	-	1,200,000	300,000	-	1,500,000
2	Jabir	750,000	4,675,000	-	-	5,425,000
3	Amiruddin	3,750,000	2,137,500	255,000	-	6,142,500
4	Muh. Arif	-	6,210,000	-	-	6,210,000
5	Alwi	375,000	2,360,000	715,000	4,250,000	7,700,000
6	H. Rahmani Lewa	-	5,060,000	455,000	-	5,515,000
7	H. Burahima	2,100,000	3,150,000	-	2,205,000	7,455,000
8	Mappakanro	350,000	1,165,000	-	565,000	2,080,000
9	Firdaus	937,500	2,300,000	788,000	-	4,025,500
10	Bundun	1,500,000	1,222,500	2,294,000	-	5,016,500
11	Hasan	140,000	11,400,000	375,000	-	11,915,000
12	Rasta	600,000	4,430,000	270,000	-	5,300,000
13	Abd. Azis	-	-	1,535,000	-	1,535,000
14	Manggasali	70,000	4,210,000	4,374,500	-	8,654,500
15	Pg. Lewa	3,705,000	1,130,000	-	-	4,835,000
16	H. Hasaning	3,705,000	4,885,000	2,800,000	3,726,000	15,116,000
17	Pati	255,500	3,350,000	1,244,000	-	4,849,500
18	Hawatia	147,500	575,000	-	-	722,500
19	Musdahir	267,500	1,775,000	-	-	2,042,500
20	Ku'duse	1,223,000	462,500	1,422,500	-	3,108,000
21	Amri	1,843,000	550,000	-	-	2,393,000
22	Damang	1,098,000	1,385,000	-	-	2,483,000
23	Sahir	2,136,000	1,648,000	3,384,000	-	7,168,000
24	A. Hamsah	1,581,000	5,909,000	-	-	7,490,000
25	H. Jayadi	1,816,000	1,305,500	-	-	3,121,500
26	Abd. Gaffar	2,086,000	309,000	780,000	-	3,175,000
27	A. Abd. Salam	2,666,000	6,775,000	-	-	9,441,000
28	Hj. A. Chandra	166,000	1,602,500	-	-	1,768,500
29	Jabal	396,000	309,000	-	-	705,000
30	M. Bakri	2,516,000	272,000	1,153,000	-	3,941,000
	Rata-rata	1,206,000	2,725,417	738,167	358,200	5,027,783

Lampiran 6. Luas Lahan Kemiri

NO.	Nama Responden	Luas Lahan Kemiri (ha)
1.	Abd. Salam	3
2.	Jabir	2
3.	Amiruddin	2
4.	Muh. Arif	1.5
5.	Alwi	0.5
6.	H. Rahmani Lewa	3
7.	H. Burahima	3
8.	Mappakanro	1
9.	Firdaus	2
10.	Bundun	1.5
11.	Hasan	3
12.	Rasta	4
13.	Abd. Azis	2
14.	Manggasali	4.7
15.	Pg. Lewa	3
16.	H. Hasaning	3
17.	Pati	0.5
18.	Hawatia	0.6
19.	Musdahir	0.7
20.	Ku'duse	1
21.	Amri	0.5
22.	Damang	1.2
23.	Sahir	1
24.	A. Hamsah	1
25.	H. Jayadi	5
26.	Abd. Gaffar	2
27.	A. Abd. Salam	2
28.	Hj. A. Chandra	1
29.	Jabal	1
30.	M. Bakri	5
Rata-rata		2.06

Lampiran 7. Luas Lahan non Kemiri

No.	Nama Responden	Luas Sawah (ha)	luas Kebun (ha)	Luas Ladang (ha)	Total Luas Lahan non Kemiri (ha)
1	Abd. Salam	2	0	1	3
2	Jabir	0.8	2	0	2.8
3	Amiruddin	0.25	0	0	0.25
4	Muh. Arif	0.9	0	0	0.9
5	Alwi	0.4	0.5	0.4	1.3
6	H. Rahmani Lewa	2.2	0.5	1	3.7
7	H. Burahima	2	1	2	5
8	Mappakanro	0.2	0	0.2	0.4
9	Firdaus	0.8	0.5	0	1.3
10	Bundun	0.75	0.7	0	1.45
11	Hasan	3	1	0	4
12	Rasta	2	0.5	0	2.5
13	Abd. Azis	0	0.6	0.1	0.7
14	Manggasali	1.5	1	1	3.5
15	Pg. Lewa	0.1	1	0	1.1
16	H. Hasaning	0.7	0.5	0.7	1.9
17	Pati	0.5	0.01	0	0.51
18	Hawatia	0.5	0	0	0.5
19	Musdahir	0.5	0	0	0.5
20	Ku'duse	0.5	0.05	0	0.55
21	Amri	1	0	0	1
22	Damang	0.09	0.01	0	0.1
23	Sahir	0.3	0.55	0	0.85
24	A. Hamsah	1	0	0	1
25	H. Jayadi	2	0	0	2
26	Abd. Gaffar	0.3	0.5	0	0.8
27	A. Abd. Salam	1	0.5	0	1.5
28	Hj. A. Chandra	1	0.5	0	1.5
29	Jabal	0.3	0.5	0	0.8
30	M. Bakri	0.3	2.25	0	2.55
Rata-rata					1.60

Lampiran 8. Data Regresi

L. Lahan Konversi (ha)	Jarak Lahan (km)	Pend. Sawah (Juta Rupiah)	L. Lahan Kemiri (ha)	L. Lahan non Kemiri (ha)
Y	X1	X2	X3	X4
3	5	1.2	3	3
1.5	2	4.7	2	2.8
0.16	0.2	2.1	2	0.25
0.5	0.7	6.2	1.5	0.9
0.5	0.15	2.4	0.5	1.3
0.5	0.1	5.1	3	3.7
1	1.5	3.2	3	5
0.2	4	1.2	1	0.4
0.9	1.5	2.3	2	1.3
0.75	1	1.2	1.5	1.45
1	5	11.4	3	4
0.5	0.2	4.4	4	2.5
0.7	2	0.0	2	0.7
2	0.3	4.2	4.7	3.5
1	2	1.1	3	1.1
0.5	0.6	4.9	3	1.9
0.01	1	3.4	0.5	0.51
0.5	0.05	0.6	0.6	0.5
0.5	0.05	1.8	0.7	0.5
0.55	1	0.5	1	0.55
0.1	1	0.6	0.5	1
0.1	1	1.4	1.2	0.1
0.85	2	1.6	1	0.85
0.5	2	5.9	1	1
2	1	1.3	5	2
0.8	1	0.3	2	0.8
1.5	1	6.8	2	1.5
0.5	1	1.6	1	1.5
0.8	1	0.3	1	0.8
2.55	1	0.3	5	2.55

Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Konversi HKR di Kelurahan Mario Pulana

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Luas Lahan Konversi (ha)	.8657	.71978	30
Jarak Lahan (km)	1.3450	1.29037	30
Pendapatan Sawah (Juta Rupiah)	2.725	2.5629	30
Luas Lahan Kemiri (ha)	2.057	1.3485	30
Luas Lahan non Kemiri (ha)	1.5987	1.24928	30

Correlations

		Luas Lahan Konversi (ha)	Jarak Lahan (km)	Pendapatan Sawah (Rp/tahun)	Luas Lahan Kemiri (ha)	Luas Lahan non Kemiri (ha)
Pearson Correlation	Luas Lahan Konversi (ha)	1.000	.336	-.005	.682	.526
	Jarak Lahan (km)	.336	1.000	.219	.062	.239
	Pendapatan Sawah (Juta Rupiah)	-.005	.219	1.000	.187	.477
	Luas Lahan Kemiri (ha)	.682	.062	.187	1.000	.658
	Luas Lahan non Kemiri (ha)	.526	.239	.477	.658	1.000
	Sig. (1-tailed)	Luas Lahan Konversi (ha)	.	.035	.061	.000
Jarak Lahan (km)		.035	.	.123	.373	.101
Pendapatan Sawah (Juta Rupiah)		.061	.123	.	.161	.004
Luas Lahan Kemiri (ha)		.000	.373	.161	.	.000
Luas Lahan non Kemiri (ha)		.001	.101	.004	.000	.

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.781(a)	.609	.547	.48448

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.156	4	2.289	9.753	.000(a)
	Residual	5.868	25	.235		
	Total	15.024	29			

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.019	.193		.099	.922
	Jarak Lahan (km)	-.174	.073	-.312	-2.394	.025
	Pendapatan Sawah (Juta Rupiah)	.078	.041	.277	1.905	.068
	Luas Lahan Kemiri (ha)	.311	.091	.583	3.427	.002
	Luas Lahan non Kemiri (ha)	-.115	.111	-.200	-1.037	.310

Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.1468	2.0764	.8657	.56191	30
Residual	-.78282	1.03898	.00000	.44982	30
Std. Predicted Value	-1.279	2.155	.000	1.000	30
Std. Residual	-1.616	2.145	.000	.928	30